



Kebijakan Publik Dan Kebijakan Sosial Dalam Ilmu Politik

Khoirul Huda¹, Alya Habibah Tarigan², Muliana³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Received: 02 Juli 2026
Revised: 10 Juli 2026
Accepted: 13 Juli 2026

Kajian ini membahas kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam perspektif ilmu politik dengan menekankan hubungan antara proses politik, kekuasaan, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dipahami tidak hanya sebagai keputusan administratif, tetapi sebagai produk proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Sementara itu, kebijakan sosial diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dengan menganalisis berbagai karya akademik Indonesia yang relevan dengan tema kebijakan publik dan kebijakan sosial. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur secara sistematis dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan sosial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan dan dinamika politik yang memengaruhi proses perumusan dan implementasinya. Kebijakan sosial juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan legitimasi politik pemerintah. Namun demikian, efektivitas kebijakan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kajian ini menegaskan pentingnya pemahaman kebijakan publik dan kebijakan sosial secara holistik dalam kerangka ilmu politik guna mendorong perumusan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Keywords: *kebijakan publik, kebijakan sosial, ilmu politik, kesejahteraan sosial, Dinamika Politik.*

(*) Corresponding Author: khoirulhuda@uinsu.ac.id, alyahabibahatarigan@gmail.com, Mulianamuliana191@gmail.com

How to Cite: Huda, K., Tarigan, A., & Muliana, M. (2026). Kebijakan Publik Dan Kebijakan Sosial Dalam Ilmu Politik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(7.B), 155-160. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14741>

INTRODUCTION

Kebijakan publik merupakan salah satu objek kajian utama dalam ilmu politik karena mencerminkan bagaimana negara menjalankan fungsi kekuasaan dan tanggung jawabnya dalam mengatur kehidupan masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah menerjemahkan nilai, kepentingan, dan tujuan politik ke dalam keputusan serta tindakan yang berdampak langsung pada warga negara. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga menyentuh dimensi kekuasaan, legitimasi, partisipasi, dan keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, kebijakan sosial menjadi bagian penting dari kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial mencakup berbagai program dan regulasi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, pengentasan

kemiskinan, serta penanganan kelompok rentan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara sekaligus menjaga stabilitas dan kohesi sosial di tengah dinamika perubahan sosial dan ekonomi.

Ilmu politik memandang kebijakan publik dan kebijakan sosial sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga legislatif, partai politik, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dan media. Setiap kebijakan lahir melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi yang sarat dengan kepentingan, negosiasi, serta relasi kekuasaan. Dengan demikian, kebijakan sosial tidak dapat dipahami secara netral, melainkan sebagai produk interaksi politik yang dipengaruhi oleh ideologi, sistem politik, dan struktur kekuasaan yang berlaku.

Selain itu, studi kebijakan sosial dalam ilmu politik juga menyoroti peran negara dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis kemanusiaan. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, kebijakan sosial sering kali menjadi instrumen strategis untuk menjaga legitimasi politik, memperkuat integrasi nasional, serta merespons tuntutan keadilan sosial dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial tidak hanya berdimensi ekonomi dan administratif, tetapi juga memiliki makna politik yang mendalam. (Peters, 2019)

Dengan memahami kebijakan publik dan kebijakan sosial melalui perspektif ilmu politik, mahasiswa dan peneliti diharapkan mampu menganalisis kebijakan secara kritis, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dihasilkan negara benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat, mencerminkan nilai demokrasi, serta mampu menjawab tantangan sosial di era kontemporer.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik dalam lingkup ilmu politik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi persoalan publik. Alih-alih dipandang sebagai produk hukum atau keputusan administratif yang bersifat netral dan teknokratis, kebijakan publik sejatinya merupakan hasil dari proses politik yang kompleks, mencakup penetapan agenda, perumusan, hingga evaluasi. Sebagai objek kajian utama ilmu politik, kebijakan ini mencerminkan bagaimana negara mengoperasikan kekuasaan dan tanggung jawabnya untuk mengatur kehidupan warga negara dengan menerjemahkan nilai serta kepentingan politik ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan publik selalu menyentuh dimensi kekuasaan, legitimasi, dan kontestasi kepentingan antaraktor seperti eksekutif, legislatif, partai politik, hingga kelompok kepentingan.

Dalam kerangka kebijakan publik tersebut, kebijakan sosial menempati posisi strategis sebagai instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial mencakup berbagai regulasi dan program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, hingga penanggulangan kemiskinan. Secara teoretis, kebijakan sosial dipandang sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara sesuai amanat konstitusi. Melalui kebijakan ini, negara tidak hanya berusaha menjawab persoalan

ketimpangan dan kemiskinan struktural, tetapi juga berupaya menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional di tengah dinamika perubahan ekonomi.

Namun, efektivitas kebijakan sosial sangat bergantung pada konfigurasi kekuasaan dan dinamika politik yang melatarbelakanginya. Di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan sosial sering kali memiliki dimensi politik yang mendalam, di mana program seperti bantuan sosial atau subsidi digunakan sebagai sarana untuk menjaga legitimasi politik pemerintah, terutama dalam situasi krisis. Hal ini menyebabkan kebijakan sosial kerap menjadi arena negosiasi dan kompromi antaraktor kebijakan, yang jika tidak dikelola dengan komitmen politik dan kapasitas kelembagaan yang kuat, dapat menghambat tercapainya keadilan sosial. Dengan demikian, pemahaman holistik dalam ilmu politik menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses politik dan nilai keadilan yang mendasarinya.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam konsep, teori, dan dinamika kebijakan publik serta kebijakan sosial dalam perspektif ilmu politik. Melalui pendekatan ini, kebijakan dipahami sebagai produk proses sosial dan politik yang dipengaruhi oleh nilai, kepentingan, dan relasi kekuasaan. (Sugiyono,2021)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa buku ajar, monograf, dan karya ilmiah penulis Indonesia yang membahas ilmu politik, kebijakan publik, dan kebijakan sosial. Adapun data sekunder meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi, laporan kebijakan pemerintah, serta dokumen resmi negara yang relevan dan diterbitkan dalam rentang waktu 2021–2025.(Winarno,2022)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas penulis, serta kontribusinya dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan kebijakan sosial di Indonesia. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus kajian. (Bungin,2021)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan pemikiran dan temuan para ahli, kemudian menganalisisnya secara kritis dan komparatif. Teknik ini digunakan untuk memahami hubungan antara kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam konteks sistem politik Indonesia serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. (Bungin,2021)

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai literatur dari penulis dan pendekatan yang berbeda. Teknik ini bertujuan meminimalkan subjektivitas peneliti serta memperkuat validitas hasil analisis, sehingga kesimpulan yang

dihasilkan memiliki dasar teoretis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Solichin,2023)

Melalui metode penelitian ini, diharapkan kajian yang dihasilkan mampu memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif tentang kebijakan publik dan kebijakan sosial, serta relevan untuk pengembangan kajian ilmu politik di Indonesia.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Berdasarkan hasil telaah literatur, kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persoalan publik. Kebijakan publik tidak hanya dilihat sebagai produk hukum atau program, melainkan sebagai proses politik yang mencakup penetapan agenda, perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dalam perspektif ini, kebijakan publik menjadi sarana utama negara dalam mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. (Winarno,2021)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan sosial merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang secara khusus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial mencakup bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta penanggulangan kemiskinan. Literatur Indonesia menegaskan bahwa kebijakan sosial merupakan instrumen negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. (Suharto,2021)

Selain itu, hasil kajian mengungkap bahwa proses perumusan kebijakan publik dan kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan politik. Aktor-aktor kebijakan seperti eksekutif, legislatif, birokrasi, partai politik, dan kelompok kepentingan memiliki peran yang berbeda dalam menentukan arah kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali mencerminkan kompromi politik antaraktor tersebut. (Solichin,2023)

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sosial kerap digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi politik pemerintah. Program bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial tidak hanya memiliki dimensi kesejahteraan, tetapi juga dimensi politik, terutama pada masa krisis ekonomi, bencana alam, dan situasi sosial yang rentan. Hal ini menunjukkan kuatnya relasi antara kebijakan sosial dan dinamika politik nasional. (Nugroho,2021)

Discussion

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan publik dalam perspektif ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan dan proses pengambilan keputusan politik. Kebijakan publik bukan sekadar hasil kerja teknokratis, melainkan produk dari interaksi, negosiasi, dan kontestasi kepentingan antaraktor politik. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik harus mempertimbangkan dimensi politik yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. (Budiardjo,2022)

Kebijakan sosial, sebagai bagian dari kebijakan publik, memiliki posisi strategis dalam membangun hubungan antara negara dan masyarakat. Kebijakan sosial mencerminkan sejauh mana negara hadir dalam memenuhi tanggung

jawabnya terhadap kesejahteraan rakyat. Namun, efektivitas kebijakan sosial sangat ditentukan oleh komitmen politik pemerintah serta kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan secara adil dan merata. (Suharto,2022)

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masalah implementasi di tingkat daerah. Dalam perspektif ilmu politik, persoalan tersebut berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, desentralisasi kekuasaan, dan kualitas institusi politik. (Setivono,2021)

Selain itu, kebijakan sosial memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. Kebijakan yang responsif dan tepat sasaran dapat meningkatkan legitimasi pemerintah, sedangkan kebijakan yang tidak adil atau tidak efektif berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial dan konflik politik. Dengan demikian, kebijakan sosial berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas politik nasional. (Rasyid,2021)

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dan kebijakan sosial harus dipahami secara holistik dalam kerangka ilmu politik. Kebijakan tidak hanya dinilai dari output dan dampaknya, tetapi juga dari proses politik, nilai yang mendasarinya, serta kontribusinya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini penting sebagai landasan kritis bagi pengembangan studi kebijakan di Indonesia. (syafiie,2023)

REFERENCES

- Budiardjo, Miriam.(2022) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan.(2021) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Flick, Uwe.(2022) *Qualitative Research Design*. Jakarta: Kencana (edisi terjemahan).
- Hill, M., & Varone, F. (2021). *The Public Policy Process*. London: Routledge. (Penting untuk analisis aktor dan kekuasaan).
- Moleong, Lexy J.(2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana (edisi terjemahan), 2022.
- Rasyid, R. (2021). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Setiyono, B. (2021). *Birokrasi dalam Perspektif Politik*. Semarang: Undip Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2022). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2023). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahab, S. A. (2023). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*.

Yogyakarta: CAPS.